

STRATEGI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RENCANA PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Mafilda Hadi Yuliana
29.1945

*Asdaf Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: mafildahadi.yuliana2400@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced by the government in preparing the Regional Government Strategy in the formation of the New Autonomous Region in Mamuju Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to see how to develop a Regional Government Strategy in the formation of a New Autonomous Region in Mamuju Regency. **Methods:** The method used in this research is qualitative research with descriptive method and inductive approach, data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the Regional Government Strategy in the establishment of the New Autonomous Region in Mamuju Regency has been running well, in the process the supporting factors and inhibiting factors are found, as for the supporters, namely Mamuju Regency as the Capital City of West Sulawesi Province, and the obstacles encountered are the lack of the budget and moratorium on regional expansion and the government has also made efforts to overcome these obstacles quite well. **Conclusion:** The Regional Government Strategy in the Plan for the Establishment of a New Autonomous Region (DOB) in Mamuju Regency, West Sulawesi Province has been going well, because of the 3 strategic dimensions proposed by Quinn used by the author in this thesis, all of them have met the achievements.

Keywords: Strategy, Local Government, New Autonomous Region

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami pemerintah dalam menyusun Strategi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana menyusun Strategi Pemerintahan Daerah dalam pembentukan daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pemerintahan Daerah

dalam pembentukan daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju sudah berjalan dengan baik, dalam prosesnya ditemui faktor pendukung dan faktor penghambat adapun pendukungnya yaitu Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi barat, dan hambatan yang ditemui yaitu kurangnya anggaran dan moratorium pemekaran wilayah dan pemerintah juga sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cukup baik. . **Kesimpulan:** Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik, karena dari 3 dimensi strategi yang dikemukakan oleh Quinn yang digunakan penulis pada skripsi ini, semuanya sudah memenuhi pencapaian.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom Baru

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi, dan Provinsi-Provinsi itu dibagi menjadi Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak masa reformasi, pemerintah daerah mengemban tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan urusan daerah dibandingkan periode sebelumnya, hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masyarakat atau dibawah tekanan ilmu pengetahuan.

Desentralisasi dianggap sebagai kebalikan dari teori pemerintahan, sebagai konsep pemerintahan, desentralisasi menjadi pilihan karena tidak mungkin suatu negara dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar dapat mengontrol pemerintahan secara pusat (Ratnawati 2009). Pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan sejak tahun 1999 untuk mendukung dan memperlancar berbagai urusan pemerintahan negara. Dalam hal otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengelola daerahnya sendiri, tetapi masih dikendalikan oleh pemerintah pusat dan undang-undang. Ada dua cara Pembentukan daerah Otonom Baru (DOB) yaitu penggabungan beberapa daerah menjadi satu daerah dan Pemekaran Wilayah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah pada hakikatnya berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik untuk mempercepat terwujudnya kepentingan publik, dan memberikan preferensi pendidikan politik lokal. Perkembangan daerah otonom menunjukkan bahwa sejak memperoleh otonomi, semakin banyak daerah yang dianggap lebih maju dan berkembang, terutama daerah yang kaya akan sumber daya alam.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang mengiringi pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia. Hal ini dapat meningkatkan jumlah daerah otonom baru. Sulawesi Barat merupakan sebuah daerah pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Resmi berdiri pada tahun 2004, pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dapat mendorong peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan peluang pemanfaatan dan pengembangan potensi daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. “Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat berkedudukan di Mamuju”, begitulah bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Mamuju berada ditengah-tengah Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju terdiri dari 11 Kecamatan, 13 Kelurahan, dan 88 Desa. Pada tahun 2017 tercatat jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju mencapai 297.096 jiwa dengan luas wilayah 4.999,69 km² dan sebaran penduduk 59 jiwa/km (Putra 2018). Kabupaten Mamuju merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun demikian, Mamuju sampai saat ini bukanlah daerah otonom yang memiliki Wali Kota ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sendiri, melainkan masih menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju yang dipimpin oleh seorang Bupati. Dengan kata lain Mamuju belum menjadi Kota Madya walaupun sudah menjadi Ibu Kota Provinsi. Pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju termasuk dalam pemekaran wilayah. Dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju hanya ada 5 Kecamatan yang diperkirakan menjadi wilayah Daerah Otonom Baru, 5 Kecamatan tersebut antara lain :

Tabel 1
Kecamatan Yang Diperkirakan Akan Menjadi Wilayah Kota

No	Kecamatan	Luas wilayah (km ²)
1	Kecamatan Kepulauan Bala-balakang	1,47
2	Kecamatan Mamuju	246,22
3	Kecamatan Simboro	132,06
4	Kecamatan Tapalang	271,63
5	Kecamatan Tapalang Barat	111,06

Sumber : Kabupaten Mamuju Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas kita dapat melihat cakupan wilayah Daerah Otonom Baru Kota Mamuju. Rencana pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Mamuju yang telah di rencanakan beberapa tahun silam yang sampai saat ini masih melakukan peninjauan dan pengkajian terhadap syarat-syarat ketentuan terkait pantas tidaknya Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi sebuah Kota. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju dianggap hal yang mendesak agar Kabupaten Mamuju menjadi daerah yang memiliki pemerintahan yang definitif. Syarat-syarat Pembentukan Daerah terkadang menjadi hambatan yang sangat besar dalam proses pembentukannya, sehingga terkadang memakan waktu yang cukup lama dan berlarut-larut karena terhambat masalah syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut.

Status Ibukota Provinsi yang masih berbentuk Kabupaten mengakibatkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi salah Satu Provinsi yang tertinggal karena tidak adanya Kota Administratif dalam satu provinsi. Jika Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju terlaksana akan

banyak manfaat yang ditimbulkan, diantaranya percepatan pembangunan dapat dilakukan karena alokasi penganggaran yang saat ini masih dioptimalkan menyentuh ke pelosok dapat dikonsentrasikan ke kota dan di sisi lain dengan adanya kota administratif tentu akan menjadi daya tarik terhadap investasi yang akan masuk dan pada akhirnya akan dapat mempercepat pembangunan demi kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, strategi pemerintah diperlukan dalam hal ini, bagaimana pemerintah Kabupaten Mamuju dapat menyusun strategi sebaik mungkin agar rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju dapat terlaksana dengan baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Ilham Jamaluddin 2014 yang berjudul Pembentukan Daerah Otonom Baru Studi Tentang Rencana Pembentukan Kabupaten Balanipa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa segala persyaratan sesuai dengan PP 78 tahun 2007 sudah sesuai dengan syarat-syarat kelengkapan yang telah ditempuh oleh calon DOB Kabupaten Balanipa. Melihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilham Jamaluddin maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian kedua, yaitu penelitian Epharim Deviaro Ginting 2014 yang berjudul Pembentukan Daerah Otonom Baru : Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian ini bahwa untuk persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan fisik calon Kota Tangerang Selatan telah terpenuhi dan dinyatakan lulus. Melihat dari hasil Penelitian yang dilakukan oleh Ephraim Deviaro Ginting maka peneliti menemukan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dan Penelitian ketiga, yaitu penelitian Korpus Kristi Yohanes Darmo (Jurnal Ilmu Pemerintahan) 2017. Adapun hasil dari penelitian yaitu Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Selatan telah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Namun hingga kini terkendala pada perubahan undang-undang pemerintah daerah sehingga perlu menunggu peraturan pemerintah sebagai aturan teknis UU No. 23 tahun 2014.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian yang dilakukan Ilham Jamaluddin meneliti tentang strategi pemerintahan daerah dalam rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ilham Jamaluddin meneliti tentang rencana Pembentukan Daerah Otonom (DOB) Kabupaten Balanipa. Penelitian yang dilakukan Epharim Deviaro Ginting (Skripsi) 2014 meneliti tentang strategi pemerintah daerah dalam rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ephraim Deviaro Ginting meneliti tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan. Dan Penelitian yang dilakukan Korpus Kristi Yohanes Darmo (Jurnal Ilmu Pemerintahan) 2017 meneliti tentang strategi pemerintah daerah dalam rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Korpus Kristi Yohanes Darmo meneliti tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Selatan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pemerintahan daerah dalam rencana pembentukan daerah otonom baru di kabupaten mamuju, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintahan daerah dalam rencana pembentukan daerah otonom baru di kabupaten mamuju, untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor penghambat strategi pemerintahan daerah dalam rencana pembentukan daerah otonom baru (dob) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

II. METODE

Penelitian ini berjudul Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam skripsi ini adalah teori strategi dari Quinn yang menjelaskan bahwa dalam strategi dilihat pada 3 (tiga) aspek yaitu, Tujuan, Kebijakan, dan Program. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Mamuju, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Camat Mamuju, Camat Simboro, Camat Tapalang, Camat Tapalang Barat, Camat Bala-Balakang, Camat Kalukku, Camat Papalang, Camat Kalumpang, Camat Bonehau, Camat Tommo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menganalisis Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam skripsi ini adalah teori strategi dari Quinn yang menjelaskan bahwa dalam strategi dilihat pada 3 (tiga) aspek yaitu, Tujuan, Kebijakan, dan Program.

3.1 Tujuan

Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju maka pemerintah daerah Kabupaten Mamuju menyusun suatu perencanaan strategis yang ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/11/KPT/I/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju dan Keputusan Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomro 09 Tahun 2015 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju. Penetapan tujuan dilakukan untuk mengetahui arah dan tujuan strategi yang ingin dibuat. Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam menetapkan tujuannya tentu memperhatikan berbagai aspek, seperti aspek sosial, budaya, politik, dan juga aspek pemerintahannya. maka peneliti bisa mengetahui bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru di Kabupaten Mamuju menjadi sebuah keharusan karena Kabupaten Mamuju merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, hal ini diperlukan demi mempercepat pembangunan.

Tabel 2
Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, Kecamatan Di Kabupaten Mamuju Tahun 2020

No	Kecamatan	Desa / Kelurahan	Luas km ²	Presentase persen
1	Tapalang	10	271,63	5,48
2	Tapalang barat	7	111,06	2,24
3	Mamuju	8	246,22	4,97
4	Simboro	8	132,06	2,67
5	Balabalakang	2	1,47	0,03
6	Kaluku	14	452,65	9,14
7	Papalang	9	200,89	4,05
8	Sampaga	7	110,27	2,23
9	Tommo	14	765,75	15,46
10	Kalumpang	13	179,55	36,18
11	Bonehau	9	870,02	17,56
Jumlah		101	4954,57	100,00

Sumber : BPS, Mamuju Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel 2 bisa kita lihat luas wilayah Kabupaten Mamuju masih cukup luas, sesuai dengan rencana bahwa nantinya akan ada 5 kecamatan yang akan menjadi bagian dari Kota Mamuju yaitu Kecamatan Tapalang, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Simboro, dan Kecamatan Bala-Balakang.

3.2 Kebijakan

Rangkaian keputusan yang membimbing dan membatasi tindakan yang dilakukan. Kebijakan dibuat untuk menetapkan arah suatu tujuan yang ditetapkan sehingga pembuatan kebijakan lebih memudahkan untuk mengarahkan suatu organisasi atau instansi dalam menerapkan strategi.

a. Pembuatan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan berbagai kegiatan dan upaya demi terlaksananya pembentukan Daerah Otonom Baru ini dan semua sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi pembentukan Daerah Otonom Baru ini belum bisa terealisasi dikarenakan adanya peraturan dari Pemerintah Pusat untuk tidak melakukan pemekaran

wilayah melainkan untuk mengembangkan daerah otonom yang sampai saat ini belum berkembang. Dari penjelasan tersebut dapat Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan Daerah Otonom baru di Kabupaten Mamuju masih menggunakan kebijakan yang lama hal ini dilakukan karena adanya moratorium pemekaran wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat sehingga untuk pembuatan kebijakan baru masih menunggu dari keputusan pemerintah pusat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju perlu memperhatikan kondisi daerah Kabupaten Mamuju sehingga jika ada perubahan dapat segera dilakukan pembaruan terhadap kebijakannya.

b. Persyaratan

Berdasarkan perolehan nilai keseluruhan baik Kabupaten Induk Mamuju maupun Calon Kota Mamuju berada pada rentang nilai yang dipersyaratkan, sehingga dinyatakan memenuhi kriteria. Sedangkan dari faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan baik Kabupaten induk Mamuju maupun calon Kota Mamuju juga sudah memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Untuk persyaratan Administratifnya semua sudah termasuk kedalam Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/11/KPTS/2015 Tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 09 tahun 2015 Tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju. Dengan demikian calon Kota Mamuju dapat direkomendasikan menjadi daerah otonom baru. bahwa Kabupaten Mamuju sudah memenuhi segala persyaratan pembentukan daerah otonom baru baik dari persyaratan teknis, persyaratan administrasi, dan persyaratan administrasi tinggal menunggu moratorium pemekaran wilayah dibuka kembali sehingga pemerintah Kabupaten Mamuju bisa segera mewujudkan Pembentukan Daerah Otonom Baru ini. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis pada saat penelitian, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju untuk segera melengkapi persyaratan pembentukan daerah otonom baru jika masih ada yang kurang atau belum memenuhi skor.

3.3 Program

Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru, hal ini diharapkan dapat menjadi mendukung percepatan pembentukan Daerah otonom Baru di Kabupaten Mamuju. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang didapatkan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru. Baik dari kesiapan wilayah daerah otonom baru hingga segala kesiapan lainnya yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom baru.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian oleh Ilham Jamaluddin (Skripsi) 2014 dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Temuan dari Penelitian Epharim Deviaro Ginting (Skripsi) 2014 yaitu sama-sama meneliti tentang rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Dan Temuan penelitian Kristi Yohanes Darmo (Jurnal Ilmu Pemerintahan) 2017 yaitu sama-sama meneliti tentang rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai strategi pemerintahan daerah dalam rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, maka penulis menarik kesimpulan yaitu Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik, karena dari 3 dimensi strategi yang dikemukakan oleh Quinn yang digunakan penulis pada skripsi ini, semuanya sudah memenuhi pencapaian. Pemerintah Daerah telah menetapkan tujuan Pembentukan DOB ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan serta menjadi sebuah keharusan adanya Kota Administratif di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan DOB ini juga diharapkan bisa memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan juga menjadi harapan untuk Mamuju dan Provinsi Sulawesi Barat bisa lebih maju dan bersaing dengan Provinsi-Provinsi lainnya, Kebijakan Pembentukan Daerah otonom baru di Kabupaten Mamuju sudah dimuat dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/11/KPTS/I/2015 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru Pemekaran Kabupaten Mamuju, dikeluarkannya surat ini juga untuk memenuhi persyaratan administratif pembentukan DOB kemudian untuk persyaratan Fisik dan Persyaratan teknis juga sudah terpenuhi melalui Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju bersama PT. Tambora Setia Jaya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru. Baik dari kesiapan wilayah daerah otonom baru hingga segala kesiapan lainnya yang menjadi syarat pembentukan daerah otonom baru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil penelitian strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan strategi dalam pembentukan daerah otonom dan diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Bupati Kabupaten Mamuju, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamuju, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju, Kepala Bappeda Kabupaten Mamuju, Kepala BPKAD Kabupaten Mamuju, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kabupaten Mamuju, Camat Mamuju, Camat Simboro, Camat Tapalang, Camat Tapalang Barat, Camat Bala-Balakang, Camat Kalukku, Camat Papalang, Camat Kalumpang, Camat Bonehau, Camat Tommo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2020. *MANAGEMEN STRATEGIS*. CV. Nas Medika Pustaka.
- Assauri, Sofjan. 2013. *STRATEGIC MANAGEMENT Sustainable Competitive Advantages*. 2 ed. PT Raja Grafindo Persada.
- Afif, Wiadi. 2011. *MERETAS PEMIKIRAN STRATEGIK*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dafid Fred R. 2004. "David, Fred R., ' Manajemen Strategi Konsep' , Salemba Empat, Jakarta.

27.”

Hariadi, Bambang. 2005. *STRATEGI MANAJEMEN Strategi Memenangkan Perang Bisnis*. Malang: Bayumedia

Henee, Aime, Sebastian Desmidt, Faisal Afif, And Ismeth Abdullah. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*.

Hunger dan Wheelen. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Andi

Husein, Umar. 2008. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Khotari, C. .. 2004. *Research Methodology Methods and Thechniques*. New Delhi.

Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasaran Indonesia.

Pearce John and Robinson Richard. 2014. *Manajemenen Strategis : Formulasi Implementasi, Dan Pengendalian*. 12 buku 1. Jakarta: Salemba empat.

Rangkuti, Freddy. 2016. *Teknik Membedah Kasus Bisnis: ANALISIS SWOT*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah: Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salusu, J. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metode Penelitian Pemerintahan Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: ALFABETA.

Steiner, G. & Miner J. 1997. *Kebijakan Dan Strategi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.

Suradinata, Ermaya. 2003. *Manajemen Perubahan Dan Strategi : Kepemimpinan Kreatif*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
Ringkasan Eksekutif Kajian Kelayakan Pembentukan Kota Mamuju pemekaran Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat

<https://www.kppod.org/berita/view?id=916>

<https://www.antaraneews.com/berita/226163/mendesak-pembentukan-mamuju-jadi-kota-madya>

<http://wacana.info/berita/5139/mamuju-tak-kunjung-berubah-status-ibu-kota-provinsi-bakal-bergeser->

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>

Putra, Johan Herdi. 2018. “Empat Ibu Kota Provinsi yang masih Berstatus Kabupaten.” *Brillio.net*. Diambil (<https://www.brilio.net/creator/tahukan-anda-4-ibukota-provinsi-di-indonesia-ini-tidak-memiliki-walikota-lho-040495.html>).

R Amalia. 2020 “Perkembangan Pemerintahan Era New Normal Di Indonesia.” (https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=7tZNAyYAAA-AJ&alert_preview_top_rm=2&citation_for_view=7tZNAyYAAA-AJ:rO6llkc54NcC)